

TESIS

**INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER DI
INDONESIA**



OLEH:

ANITA ZAHRI, S.H.

NIM.032014153042

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN PIDANA MILITER DI
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH :

**ANITA ZAHRI, S.H.
NIM.032014153042**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 18 Mei 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama



Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001

Dosen Pembimbing Kedua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 18 Mei 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Anggota : 1. Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196504101990022001
2. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph. D.
NIP. 1980004172005011005
3. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
NIP. 196809281997021001
4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198104072005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA ZAHRI, S.H.

NIM : 032014153042

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Tesis : **INDEPENDENSI SISTEM PERADILAN PIDANA**

MILITER DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis atau karya tulis ilmiah lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 18 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Anita Zahri, S.H.
NIM. 032014153042

MOTTO

**“Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa
kehilangan semangat”**

Abraham Lincoln

ABSTRAK

Peradilan Militer merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menjadi pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam suatu kasus yang di hadapi di suatu peradilan militer dapat saja komandan membuat surat rekomendasi untuk meminta keringanan hukuman bagi anggotanya yang masih di pertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara yang sedang ditanganinya, hal ini membuat seorang Hakim Militer menjadi sulit untuk menjaga independensinya ketika menangani suatu perkara pidana yang ada hubungannya dengan kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu Substansi hukum yang menjadi landasan sistem peradilan militer dan hukum acara pidana militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan konstitusi terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan tesis ini rumusan pertama membahas mengenai konsep independensi dalam sistem peradilan militer dan rumusan yang kedua membahas mengenai ratio decidendi hakim dalam memutus suatu perkara di pengadilan militer. Penulisan ini mengedepankan penelitian perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang dalam penulisannya dengan mengumpulkan sumber bahan hukum seperti putusan pengadilan serta jurnal hukum. Dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu dengan mengedepankan mengenai asas-asas hukum dan penelitian terhadap sistematika hukum. Kesimpulan atau hasil akhir yang ingin dicapai atas isu hukum yang ada, yaitu dalam Pembinaan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan militer dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sebagaimana diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dan juga di harapkan pemerintah dan DPR Republik Indonesia untuk secepatnya membuat serta mengesahkan undang-undang baru yang menggantikan keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada pada saat ini.

Kata Kunci : TNI, Hakim Militer, Independensi, Peradilan Militer

ABSTRACT

Military justice is one of the judiciary bodies under the Supreme Court of the republic of Indonesia that serves as the executor of the judiciary power in the TNI neighborhood to enforce law and justice in order to promote the interests of the state defense. In a case faced by a military justice the commander may make a recommendation letter asking for leniency for his members who the judge still considers cutting the case under his administration, making it difficult for a military judge to maintain independence when dealing with a criminal case that relates to executive power. Therefore, legal substances based on the military judicial system and the military criminal proceedings law number 31 in 1997 of military justice were no longer relevant to the constitutionalization of the constitution especially after the fundamental amendment of the united republic of Indonesia in 1945. The writing of this thesis was based on the independent concept of the military justice system and the second formulation on how ratifying the judges were deciding matters for the military court. This paper brought to the fore studies of legislation and case approaches, in which it collected legal sources such as court ruling and a law journal. In writing this thesis used the normative type of research in which to advance on legal principles and the study of legal systems. It is expected that the government and parliament of the republic of Indonesia will immediately begin creating and enforcing a new law that replaces law number 31 of 1997 on military justice, which is no longer relevant to current conditions.

Key Words : *Indonesia Army, Military Judges, Independence, Military Justice.*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Independensi Sistem Peradilan Pidana Militer Di Indonesia”**.

Penulisan Tesis ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selesaiannya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal masa perkuliahan hingga selesainya tesis ini. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dan apresiasi, semoga Allah SWT membalas kebaikan serta memberikan senantiasa kesehatan yang baik, kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., A.k., C.MA., selaku Rektor beserta jajaran wakil rektor Universitas Airlangga.
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. dan Bapak Taufik

Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen penguji yang telah memberikan waktu, saran, arahan, bimbingan serta kesabaran beliau yang diberikan dalam penulisan tesis ini sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. selaku ketua penguji tesis dan kepada ibu Dr. Toetik Rahayuningsih, S.H., M.Hum, dan bapak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M selaku anggota penguji tesis yang telah memberikan arahan, kritikan dan saran yang membangun selama pelaksanaan sidang tesis.
6. Ibu Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A., selaku dosen wali yang sudah memberikan masukan dan arahan pada program penyusunan mata kuliah.
7. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Zahri, dan Ibunda Asnawati, atas segala doa dan pengorbanannya baik secara moril dan materil, yang tiada henti selalu memberikan semangat, motivasi, bimbingan kepercayaan, dan kasih sayang selama ini.
8. Ayunda Selvi Zawita Sari yang selalu memberi motivasi, memberi arahan, dan selalu menjadi tempat cerita selama ini dan keponakan saya tercinta Altezza yang selalu lucu dan selalu menjadi teman bermain.
9. Kak Medi Darmawansyah, S.H., M.H. yang selama ini sudah memberikan ilmu, motivasi dan bimbingannya selama kuliah S1 sampai kuliah S2.
10. Sahabat-sahabat saya yang ada di Palembang yang selalu membantu dan memberikan dukungan yaitu Efrianza, S.H., M.KN. dan Muhammad Reyhan Sanovril, S.H.

11. Sahabat-Sahabat saya selama perkuliahan dari semester awal masuk kuliah sampai akhir yang selalu memberikan semangat dan saling bertukar cerita yaitu Fitriyah Khadijah, S.H., M.H. dan Eunique Louisa W.P., S.H., M.H.

Sebagai kalimat penutup, semoga seluruh kebaikan pihak-Pihak yang telah memberikan masukan dan saran yang mendukung akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga tesis ini membawa kemanfaatan bagi perkembangan ilmu hukum

Surabaya, 18 Mei 2022

Penulis,



Anita Zahri, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, untuk selanjutnya disebut KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3713)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5591)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076)

Keppres RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar TNI Ke Mahkamah Agung.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI Nomor: KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Nomor: Skep/420/IX/2004 tanggal 01 September 2004 tentang Kerja Sama Dalam Pembinaan Personil Militer Bagi Prajurit TNI Yang Bertugas Pada Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer.

DAFTAR PUTUSAN

Putusan Pengadilan Militer Nomor : 21-K/PM I-04/AD/I/2018 tanggal 17 Januari 2018.

Putusan Pengadilan Militer Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018 tanggal 05 April 2018.

Putusan Pengadilan Militer Nomor : 52-K/PM I-04/AL/III/2018 tanggal 10 April 2018.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika Penulisan	20
BAB II KONSEP INDEPENDENSI DALAM SISTEM PERADILAN	
 MILITER.....	21
2.1. Independensi Sistem Peradilan Militer	21
2.2. Sistem Peradilan Militer Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997	24
2.3. Pengaruh satu atap setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman	34
BAB III RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU	
 PERKARA DI PENGADILAN MILITER.....	41
3.1. Putusan Nomor : 21-K/PM I-04/AD/I/2018	41
3.2. Putusan Nomor : 13-K/PM I-04/AD/I/2018	47

3.3. Putusan Nomor : 52-K/PM I-04/AL/III/2018	52
3.4. Analisis Ratio Decidendi Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Anggota TNI	57
BAB IV PENUTUP.....	75
4.1. KESIMPULAN	75
4.2. SARAN	76
DAFTAR BACAAN	77